

**RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA
TAHUN 2025**

**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2024**

PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT. yang atas berkat rahmat dan karuniaNya, telah diselesaikan penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Purbalingga tahun 2025. Laporan ini dibuat sebagai wujud pertanggungjawaban unit kerja kepada publik dalam memantau sejauh mana terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Penyusunan Rencana Kerja 2025 ini masih berpedoman pada UU no 25 Tahun 2004. Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dan PERMENPAN No.23Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah .Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP no 8 tahun 2008 tentang Penyusunan Rencana Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Pembangunan daerah.

Rencana Kerja OPD DKPP Kabupaten Purbalingga disusun sebagai dokumen resmi OPD yang menjembatani Rencana Kerja OPD DKPP dengan Rencanan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025.

Kami berharap Renana Kinerja ini dapat menjadi pegangan semua pihak untuk memberikan koreksi kearah positif demi kemajuan pembangunan Ketahanan Pangan dan Perikanan di Kabupaten Purbalingga. Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak yang mengkajinya.

Purbalingga, Februari 2024

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PURBALINGGA



Drs. Mohammad Najib, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19651215 199303 1 010

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai rencana pembangunan Tahunan dan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD). OPD sebagai instansi pelaksana kebijakan daerah juga berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) yang mengacu pada RKPD DAN RPJMD dengan mempertimbangkan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Purbalingga.

Penyusunan Rencana kerja (RENJA) Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga disusun sebagai acuan dan panduan dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga pada tahun 2025. Dengan tersusunnya Rencana Kerja tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan bertujuan untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan ketahanan pangan dan sumber daya manusia secara menyeluruh.

2. Landasan Hukum

Peraturan Perundangan yang melatar belakangi penyusunan RENJA Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga adalah:

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan disusun berdasarkan landasan :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 586 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2026

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

- Dijadikan sebagai arah kebijakan dan program dalam pelaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan Ketahanan Pangan dan Perikanan di Kabupaten Purbalingga selama satu tahun kedepan.
- Sebagai penjabaran implementasi dari Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) pada sebagian Bidang ketahanan pangan dan perikanan di Kabupaten Purbalingga.
- Menjadi salah satu pedoman dan bahan acuan seluruh unsur pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan

b. Tujuan

- membantu seluruh jajaran atau aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga dalam pencapaian tujuan dan sasaran berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan di Kabupaten Purbalingga.
- memuaskan bagi para pemangku kepentingan dalam pembangunan Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam memahami dan mensinergiskan dengan arah kebijakan dan program prioritas serta kegiatan operasional tahunan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga.
- mengarahkan pembangunan bidang ketahanan pangan dan perikanan di kabupaten Purbalingga tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2025.

4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (RENJA) SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, berisikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU menjelaskan Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan meliputi Program dan Kegiatan, Sasaran dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan, Hasil Pelaksanaan Program Kegiatan.

BAB III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, membahas rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025

BAB IV : PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

A. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Capaian Kinerja Program

Berdasarkan hasil pengukuran Kinerja Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Realisasinya tercermin dalam tabel sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN TAHUN 2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Capaian 2022	TARGET 2023	CAPAIAN 2023
Meningkatnya status pangan masyarakat		Indek Ketahanan pangan	Angka/ Nilai	79,25	81,5	78,05
	Meningkatnya status pangan masyarakat	Skor PPH	Angka	84,1	87,7	90,7
	Meningkatnya Kualitas kelembagaan DKPP	Nilai Sakip DKPP	Angka	71,21	<u>67,96</u>	63,96
Meningkatnya Nilai tambah Sektor Perikanan		PDRB Sektor Perikanan	Angka	<u>473.920.780.000</u>	<u>445.000.000.000</u>	<u>509.287.520.000</u>
	Meningkatnya Nilai Produksi Ikan	Nilai Produksi Perikanan tangkap,hias,bu didaya dan pengolahan	Rupiah	299.783.411.000	305.796535.000	306.642.970.000

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat ketahanan pangan suatu wilayah, apakah suatu wilayah tahan pangan atau rentan pangan. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan Skor/Indeks Komposit dari semua indikator yang digunakan untuk mengukur Tingkat ketahanan pangan suatu wilayah baik nasional maupun daerah. Penyusunan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) mengadopsi pengukuran Indeks Ketahanan Pangan Global (*Global Food Security Indeks – GFSI*) dengan berbagai penyesuaian metodologi sesuai dengan ketersediaan data dan informasi ditingkat wilayah Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dihitung berdasarkan 9 (Sembilan) indikator yang merupakan

turunan dari 3 (tiga) aspek/pilar ketahanan pangan yaitu *Ketersediaan Pangan*, *Keterjangkauan Pangan* dan *Pemanfaatan Pangan*. Pemilihan indikator yang digunakan dalam penyusunan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) didasarkan pada (i) Hasil review terhadap indeks ketahanan pangan global; (ii) Tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) Keterwakilan tiga pilar ketahanan pangan; dan (iv) Ketersediaan data secara rutin untuk periode tertentu (tahunan). Terdapat 9 (Sembilan) indikator yang digunakan dalam penyusunan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang terbagi sesuai 3 (tiga) aspek ketahanan pangan yaitu :

I. Aspek Ketersediaan Pangan :

1. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu dan sagu, serta stok beras pemerintah daerah;

II. Aspek Keterjangkauan :

1. Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan
2. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65%
3. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik

III. Aspek Pemanfaatan Pangan :

1. Rata-rata lama sekolah perempuan berusia diatas 15 tahun
2. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih
3. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk
4. Persentase balita stunting
5. Angka harapan hidup pada saat lahir

Skor Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan Skor Komposit (gabungan) dari seluruh skor setiap indikator yang digunakan sebagai alat ukur dalam penyusunan Indeks Ketahanan Pangan (IKP).

Penyusunan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dilaksanakan setiap tahun oleh Badan Ketahanan Pangan dengan berbasis pada data satu tahun sebelumnya.

Data capaian IKP

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Capaian 2023	Capaian %
Indek Ketahanan Pangan (IKP)	Angka	NA	NA	79,85	80,15	79,33	79,25	78,05	

Secara Nasional setiap tahun Laporan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dirilis oleh Badan Ketahanan

Pangan Kementerian Pertanian (sampai dengan tahun 2021) dan Badan Ketahanan Pangan Nasional (sejak tahun 2022) karena adanya pemisahan Badan Ketahanan Pangan dari Kementerian Pertanian menjadi Badan Ketahanan Pangan Nasional. Peningkatan pencapaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) diklasifikasikan dalam kategori IKP Kabupaten, IKP Kota dan IKP Provinsi.

Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir ada kecenderungan mengalami penurunan baik dari sisi pencapaian skor IKP maupun peringkat. Pada Laporan IKP tahun 2020 yang merupakan IKP berbasis data tahun 2019, Skor IKP Kabupaten Purbalingga adalah 79,85. Pada tahun 2020 skor IKP Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan menjadi 80,15. Pada tahun skor IKP Kabupaten Purbalingga adalah 79,33. Sedangkan pada tahun 20, skor IKP Kabupaten Purbalingga adalah 79,25. Pada tahun 2022 IKP Kabupaten Purbalingga mengalami penurunan lagi ke 79,25 dan pada tahun 2023 IKP Kabupaten Purbalingga mengalami penurunan menjadi 78,05.

Apabila dilihat lebih jauh kecenderungan penurunan IKP Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu tiga tahun terakhir bisa dilihat dari tiga kelompok komponen penyusun IKP yang menjadi dasar indikator dalam penyusunan IKP, yaitu aspek ketersediaan pangan, aspek keterjangkauan pangan dan aspek pemanfaatan pangan. Dari ketiga aspek tersebut bisa dilihat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut, untuk tahun 2021 aspek ketersediaan pangan skornya 85,43 aspek keterjangkauan 76,47 dan aspek pemanfaatan 76,90. Pada tahun 2022 untuk aspek ketersediaan pangan mengalami penurunan menjadi 82,80 aspek keterjangkauan pangan mengalami kenaikan menjadi 77,54 dan aspek pemanfaatan mengalami juga mengalami peningkatan menjadi 77,86. Pada tahun 2023 untuk aspek ketersediaan pangan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 menjadi 80,96 aspek keterjangkauan juga mengalami sedikit penurunan menjadi 77,40 dan aspek pemanfaatan juga mengalami penurunan menjadi 76,35;

Kecenderungan penurunan IKP terjadi ada disebabkan beberapa variable. Salah satu variable yang sangat signifikan pengaruhnya adalah terjadinya pandemi covid 19 yang mengakibatkan terjadinya perubahan secara drastis terhadap pola hidup masyarakat yang berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penurunan skor 9 (sembilan) indikator yang digunakan dalam penyusunan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dan bermuara pada penurunan skor komposit Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Purbalingga.

Cara kita melihat skor Indeks Ketahanan Pangan (IKP) harus secara komprehensif yaitu melihat dari besarnya skor dan posisi peringkat secara nasional dikomparasikan dengan skor yang menggambarkan kategorisasi suatu daerah termasuk daerah yang tahan pangan atau rentan. Meskipun secara skor dan peringkat Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Purbalingga ada kecenderungan mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir tetapi dari sisi skor yang diperoleh masih masuk dalam kategori daerah yang sangat tahan pangan, karena skornya masih diatas 70,

disamping itu secara peringkat Kabupaten Purbalingga juga termasuk diatas atau diatas setengah dari jumlah Kabupaten.

Secara umum ketahanan pangan Kabupaten Purbalingga cukup baik dari sistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan. Pada sistem ketersediaan pangan berdasarkan hasil analisa Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 produksi komoditas pangan utama menunjukkan surplus apabila dibandingkan dengan konsumsi penduduknya. Untuk komoditas beras mengalami surplus sebanyak 16.745 ton. Namun demikian terdapat beberapa komoditas yang produksinya lebih sedikit dibandingkan dengan konsumsinya.

Tabel 3.66 Capaian Kinerja Skor Pola Pangan Harapan

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Capaian 2023	Capaian %
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	85,21	85,5	86,9	88,8	80,3	84,1	90,7	104,2 %

Dengan menggunakan aplikasi yang sudah distandarkan, maka dengan menginput data susenas diperoleh hasil sebagai berikut berdasarkan pada kecukupan energy sebesar 2.100 kkal/kapita/hari.

Tabel : Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Penduduk Berdasarkan Data Survey Sosial Ekonomi Nasional Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

No	KELOMPOK PANGAN	BERAT (Gram)	KKAL/ KAP	%	AKE	BOBOT	SKOR AKTUAL	SKOR AKE	SKOR MAKS	SKOR PPH
1	Padi-padian	266,5	1.036	53,2	49,3	0,5	26,6	24,7	25,0	24,7
2	Umbi-umbian	42,7	50	2,6	2,4	0,5	1,3	1,2	2,5	1,2
3	Pangan Hewani	75,4	201	10,3	9,6	2,0	20,6	19,1	24,0	19,1
4	Minyak/ Lemak	30,7	276	14,2	13,2	0,5	7,1	6,6	5,0	5,0
5	Buah/biji berminyak	2,2	13	0,7	0,6	0,5	0,3	0,3	1,0	0,3
6	Kacang-kacangan	30,8	90	4,6	4,3	2,0	9,3	8,6	10,0	8,6
7	Gula	20,8	79	4,1	3,8	0,5	2,0	1,9	2,5	1,9
8	Sayur dan buah	253,7	145	7,5	6,9	5,0	37,3	34,6	30,0	30,0
9	Lain-lain	56,1	58	3,0	2,8	-	-	-	-	-
			1.948	100,0	92,8		104,4	96,9	100,0	90,7

Mengacu pada data Skor AKE di atas maka dapat dijabarkan bahwa untuk kelompok pangan padi-padian dengan skor PPH 24,7, bila dibandingkan dengan skor pph dengan data tahun berjalan mengalami kenaikan sebesar 1. Ini menunjukkan terjadi pola konsumsi kelompok padi-padian terjadi tren naik di masyarakat.. Pada kelompok umbi-umbian skor pph baru mencapai 1,2, atau 48 % dibandingkan dengan skor maksimal 2,5, ini menunjukkan konsumsi umbi-umbian masih rendah di kalangan masyarakat sehingga masih memungkinkan untuk ditingkatkan konsumsi umbi-umbian. Dan bila dibandingkan dengan skor pph tahun sebelumnya terjadi kenaikan sebesar 0,1 yaitu dari 1,1 menjadi 1,2. Untuk kelompok pangan hewani skor pph 19,1 atau 79,58 % dari skor maks sebesar 24,0. Bila dibandingkan dengan skor pph tahun berjalan untuk pangan hewani sebesar 18,3 maka sesungguhnya mengalami peningkatan sebesar 0,8.

Kemungkinan kenaikan ini disebabkan oleh turunnya harga daging ayam dan telur, yang fluktuatifnya relative cepat. Atau juga dapat dipicu oleh konsumsi disaat musim hajatan. Untuk kelompok minyak /lemak skor pph sudah mencapai angka maksimal sam dengan skor pph tahun berjalan yaitu sebesar 5,0. Kelompok buah/biji berminyak mengalami kenaikan dibanding data tahun sebelumnya sebesar 0,1. Angka tersebut baru mencapai 30 % dibandingkan dengan skor maks sebesar 1,0. Artinya masih memungkinkan untuk dinaikan konsumsi buah/biji berminyak. Kelompok kacang-kacangan pencapaian skor pph sebesar 8,6 atau 86 % dari skor maksimal sebesar 10,0. Mengacu pada skor maksimal sudah barang tentu konsumsi kacang-kacangan masih perlu ditingkatkan. Kelompok gula pencapaian skor pph sebesar 1,9 atau 76 % dari skor maksimal sebesar 2,5. Masih memungkinkan untuk meningkatkan konsumsi gula. Bila dibandingkan dengan data tahun sebelumnya dengan skor pph 1,8 maka skor pph akhir naik sebesar 0,1. Untuk kelompok sayur dan buah skor pph akhir sebesar 34,6 atau sudah melampaui skor maksimal sebesar 30,0.

Dan apabila dibandingkan dengan skor pph tahun sebelumnya sebesar 27,7 maka skor pph akhir naik sebesar 6,9. Kemungkinan asumsi adalah kegiat pekarangan pangan lestari (P2L) yang hampir mencapai 44 lokasi / desa dan atau kelurahan dengan produksi utama sayuran. Sehingga jangkauan konsumsi sayur menjadi lebih luas. Disebabkan produksi KWT yang sebagian dikonsumsi oleh masyarakat lingkungan. Skor PPH pada tahun sebelumnya sebesar 84,1 sedangkan skor pph tahun 2023 sebesar 90,7, dengan demikian terjadi kenaikan sebesar 6,6. Banyak faktor yang menjadikan skor pph kabupaten purbalingga tahun 2023 naik. Sudah barang tentu mencapai idela bukan perkara mudah. Semua daya upaya dikerahkan untuk meningkatkan keseimbangan pangan masyarakat. Kegiatan pelatihan olahan pangan lokal, kegiatan B2SA, Pemanfaatan tanah pekarangan, P2L, semua itu upaya untuk menaikkan skor PPH.

Skor PPH Konsumsi Kabupaten Purbalingga sebesar 90,7 masuk dalam kategori segitiga emas, dengan ciri – ciri :

- Energi dari padi-padian dan umbi-umbian sedikit diatas norma PPH atau relatif sama.
- Energi dari pangan hewani diatas 12% atau relatif sama dengan norma PPH.
- Energi dari kelompok pangan lain sudah memenuhi norma PPH

Skor PPH konsumsi dengan mendasarkan pada konsumsi energy sebesar 2100 kkal per kapita per hari menunjukkan energy yang dikonsumsi masih belum cukup karena baru mencapai 1.948 kkal/kapita/hari atau baru mencapai 92,76 persen.

1. Konsumsi minyak/lemak dan sayur buah sudah mencapai skor optimal. Adapun untuk konsumsi padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, buah dan biji berminyak, kacang-kacangan, gula, masih di bawah skor optimal sehingga konsumsinya masih perlu ditingkatkan kembali.
2. Faktor- faktor yang berhubungan dengan skor pola pangan harapan adalah besar anggota keluarga, pengetahuan gizi, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, pengeluaran pangan rumah tangga, pantangan makan, diet khusus atau diet terapi, kepemilikan lahan, sosial budaya

Pengawasan Keamanan Pangan dilakukan tim JKPD pada tahun 2023 dapat melaksanakan pengawasan, monitoring dan pendataan sebanyak 25 kali dengan jumlah produk yang diawasi dan di uji dengan rapid test kit sebanyak 50 Rapid Tes Kit Pestisida PSAT, dengan jumlah pengujian 50 sampel PSAT di peroleh hasil uji **19 positif dan 31 negatif**

Pelaksanaan kegiatan sertifikasi keamanan pangan dilaksanakan sepanjang tahun mulai Januari-Desember. Pelaku usaha yang berminat mempunyai registrasi PSAT-PDUK melakukan pendaftaran secara online melalui website oss.go.id. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Kab. Purbalingga kemudian melakukan verifikasi dan pemberian nomor registrasi PSAT-PDUK, apabila berkas dari pemohon sudah lengkap dan sesuai ketentuan.

Pada akhir tahun 2023 DKPP melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha yang sudah memperoleh register PSAT-PDUK serta menegaskan kepada pelaku usaha agar mereka memenuhi komitmen sesuai dengan pernyataan dalam dokumen pengajuan. Terbitnya sertifikat ditahun 2022 Registrasi PSAT-PDUK sebanyak 21 sertifikat dari target awal sebanyak 1 sertifikat. Sedangkan di tahun 2023 sebanyak 12 sertifikat dan satu kali pembinaan.

Dari sisi cadangan pangan masyarakat, berdasarkan hasil pendataan lumbung pangan di Kabupaten Purbalingga jumlahnya masih banyak, lumbung yang masih aktif, berkembang dan dikelola oleh Masyarakat sebanyak 119 unit dengan kondisi baik 65 unit rusak 54 desa/kelurahan. Lumbung pangan masyarakat tersebut berupa lumbung desa, lumbung kelompok tani, lumbung

RT, lumbung RW, lumbung dusun dan lumbung mardilayon. Secara umum pengelolaannya bersifat sederhana dan bersifat sosial untuk simpan pinjam gabah, dengan aset rata-rata setiap lumbung berkisar 5 ton gabah.

Pada sistem distribusi pangan, secara umum distribusi pangan berjalan lancar. Demikian juga dari akses dan harga pangan relatif stabil. Hanya beberapa bahan pangan yang mengalami kenaikan pada saat-saat tertentu dan bahan pangan yang masih mengalami ketergantungan pada impor.

Kendala yang dihadapi antara lain :

Belum optimalnya upaya pemenuhan pangan bagi masyarakat secara berdaulat. Dari sisi pemenuhan kebutuhan pangan, tingkat konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Purbalingga masih di bawah standar pola pangan harapan. Dalam rangka pemenuhan pangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah melakukan terobosan - terobosan sebagai berikut :

Mengadakan kegiatan pembagian untuk peningkatan ketahanan pangan keluarga yang dibagikan keluarga miskin untuk peningkatan konsumsi protein hewani berupa sapi potong yang dipotong bersamaan Idul Kurban

Tabel 3.64 Peningkatan ketahanan pangan keluarga tahun 2023

No	Penerima	Alamat	Umlah (ekor)
1	Grup Remaja An Nur	Dusun Limpak Tepus Rt 13 Rw 04 Desa Karangjengkol Kec. Kutasari	1
2	Grup Mir Masjid Baitul Muslimin	Desa Setjend S. Parman No 42 Kelurahan Bancar Kec. Purbalingga	1
3	Grup Pengurus Mushola Baitul Baa'its	Kelurahan Kembaran Kulon rt 003 Rw 002 Kec. Purbalingga	1
4	Grup Mir Masjid An Nur	Dusun Gemenggeng Rt 04 Rw 20 Desa Pengadegan Kec. Pengadegan	1
5	Grup Mir Mushola At Taqwa	Kelurahan Purbalingga Kidul Rt 03 Rw 03 Kec. Purbalingga	1
6	Grup Mir Masjid Ahmad Abduh	Desa Grecol Rt 005 Rw 003 Kec. Kalimanah	1
7	Grup Mir Masjid Baitul Mu'minin	Desa Sidareja Rt 14 Rw 06 Kec. Kaligondang	1
8	Grup Mir Mushola As Salam	Desa Beji Rt 1 Rw 1 Kec. Bojongsari	1
9	Grup Mir Masjid Baitul Falah	Desa Kalimanah Kulon Rt 01 Rw 01 Kec. Kalimanah	1
10	Grup Mir Masjid Al Falah	Desa Metenggeng Rt 2 Rw 1 Kec. Bojongsari	1
11	Grup Diskusi Taklim Al Falah	Kelurahan Purbalingga Kidul Rt 01 Rw 04 Kec. Purbalingga	1
12	Grup Pemuda Purbalingga	Dusun-alun Selatan No. 2 Purbalingga	1
13	Grup Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kab. Purbalingga	Kantor Sekretariat Kompleks Perguruan Muhammadiyah Purbalingga	1
14	Grup Penyuluhan Ketua Rukun Tetangga	Desa Prigi rt 3 Rw 2 Kec. Padamara	1
15	Grup Mir Masjid Al Muttaqin	Desa Pekirangan Rt 001 Rw 008 Kec. Karangmoncol	1
16	Grup Mir Masjid Baiturokhim	Desa Larangan Rt 02 Rw 01 Kec. Pengadegan	1
17	Grup Mir Masjid Al Faris	Desa Babakan Rt 11 Rw 03 Kec. Kalimanah	1

8	mir Masjid Al Muttaqien	a Pandansari Rt 09 Rw 04 Kec. Kejobong	1
Jumlah			18

B Sektor Perikanan

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat pembangunan regional adalah Produk Domestik Regional Bruto, dalam hal ini bertambahnya produksi barang dan jasa dalam Produk Domestik Regional Bruto. Nilai yang tercantum dalam Produk Domestik Regional Bruto tersebut mencerminkan taraf hidup dan tingkat perkembangan ekonomi masyarakat. Perkembangan ekonomi suatu daerah tergantung pada potensi sumber daya alam dan kemampuan sumber daya manusia untuk mengelola dan memanfaatkan potensi tersebut. Berbagai langkah dan kebijakan pembangunan ekonomi yang ditempuh oleh pemerintah dengan dukungan segenap lapisan masyarakat telah berhasil, meskipun beberapa tantangan harus dilalui. Hal ini tercermin dari nilai PDRB yang berhasil diciptakan dari tahun ke tahun terus meningkat. Hal ini perlu terus ditingkatkan untuk kemajuan perekonomian daerah. Struktur perekonomian suatu daerah dapat diketahui dengan melihat komposisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah yang bersangkutan, tentunya di pandang dari sudut kemampuan dari masing-masing sektor untuk memberikan kontribusinya dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah tersebut. Peranan suatu sektor dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah juga merupakan cerminan peranan sektor tersebut dalam pembangunan daerah yang bersangkutan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator ekonomi makro untuk mengetahui kondisi ekonomi disuatu daerah dalam suatu periode tertentu. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah (value added) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi, termasuk sektor perikanan. PDRB terbagi menjadi dua, yaitu (1) PDRB harga berlaku yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun; (2) PDRB harga konstan yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu waktu tertentu sebagai tahun dasar. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator ekonomi makro untuk mengetahui kondisi ekonomi disuatu daerah dalam suatu periode tertentu (Widodo 2006). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah (value added) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi, termasuk sektor perikanan.

PDRB terbagi menjadi dua, yaitu (1) PDRB harga berlaku yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun; (2) PDRB harga konstan yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu waktu tertentu sebagai tahun dasar. Berikut ini PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tahun 2019-2023 berdasarkan harga berlaku sebagai berikut:

PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN (JUTA RUPIAH)

SEKTOR	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.533.311,46	6.781.605,20	6.997.823,32	7.569.769,42	7.994.833,10
1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	5.995.875,70	6.225.590,20	6.432.004,85	6.957.350,27	7.338.299,91
a. Tanaman Pangan	1.194.950,47	1.231.889,00	1.212.055,99	1.257.404,36	1.373.232,05
b. Tanaman Hortikultura Semusim	116.492,80	123.388,90	123.506,57	131.138,55	130.867,06
c. Perkebunan Semusim	29.887,44	29.575,30	28.429,37	29.129,51	29.428,06
d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	1.956.383,51	2.182.441,90	2.239.321,79	2.501.838,39	2.449.619,81
e. Perkebunan Tahunan	1.053.095,37	1.045.416,00	1.131.334,42	1.233.993,62	1.396.654,43
f. Peternakan	1.521.572,34	1.487.942,10	1.567.814,94	1.667.493,54	1.818.083,83
g. Jasa Pertanian dan Perburuan	123.493,77	124.937,00	129.541,77	136.352,30	140.414,67
2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	127.029,61	130.310,70	134.399,97	138.498,37	147.245,67
3. Perikanan	410.406,15	425.704,30	431.418,50	473.920,78	509.287,52

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa PDRB sektor perikanan mulai dari tahun 2019-2023 mengalami kenaikan yang cukup fluktuatif. Dalam periode 2010-2019 pembangunan perikanan menunjukkan suatu perubahan yang sangat menarik untuk dikaji. Pada tahun 2019 nilai PDRB mencapai Rp. 410.406.150.000,-, sementara itu produksi ikan pada tahun 2019 mencapai 6.886 ton. Pada tahun 2020 nilai PDRB sektor perikanan mencapai Rp. 425.704.300.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 15.298.150.000,- atau naik sebesar 3,73 %. dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya Rp. 410.406.150.000,-. Pada tahun 2021 nilai PDRB sektor perikanan mencapai Rp. 431.418.500.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 5.714.200.000,- atau naik sebesar 1,34%. dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya Rp. 425.704.300.000,-, sementara itu, produksi ikan pada tahun 2021 mencapai 6.981 ton.

Untuk tahun 2022 nilai PDRB sektor perikanan mencapai Rp. 473.920.780.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 42.502,28.000,- atau naik sebesar 9,85 %, dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya Rp. Rp. 431.418.500.000,- sementara itu, produksi ikan pada tahun 2022 mencapai 6.274 ton. 435.000.000.00,-. Sementara itu untuk capaian PDRB tahun 2022 melewati target pada RPJMD yang telah ditetapkan pada tahun 2022 yaitu Rp 435.000.000.000,-. Pada tahun 2023 nilai PDRB sektor perikanan mencapai Rp.509.287.520.000,- mengalami kenaikan sebesar RP. 35.366.740.000,- atau 7,43 % dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya mencapai 473.920.780.000,-. Sementara itu untuk capaian PDRB tahun 2023 melewati target pada RPJMD yang telah ditetapkan pada tahun 2023 yaitu Rp 445.000.000.000,-. PDRB sektor perikanan menyumbang sebesar 1,63 % terhadap PDRB Kabupaten Purbalingga.

Sementara itu laju pertumbuhan PDRB sektor perikanan pada tahun 2020 mencapai 3,73 %, lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan PDRB sektor perikanan pada tahun 2021 yang mencapai 1,34 %. Sementara itu untuk tahun 2022, laju pertumbuhan PDRB sektor perikanan

mencapai 9,85%, relative lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan PDRB sektor perikanan pada tahun 2023 yang hanya mencapai 7,46 %. Laju pertumbuhan sektor perikanan mengalami nilai yang tidak konsisten. Terjadi penurunan laju pertumbuhan sektor perikanan pada tahun 2021 yang hanya mencapai 1,34 % dan mengalami kenaikan laju pertumbuhan pada tahun 2022. Tidak stabilnya nilai dari laju pertumbuhan ini disebabkan oleh tingkat produksi pada setiap tahunnya. Produksi ikan setiap tahun juga mengalami fluktuatif dimana pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 7,4% dibandingkan dengan tahun 2019.

Sektor agrokomples di Kabupaten Purbalingga terdiri dari beberapa sektor gabungan antara lain; sektor pertanian tanaman pangan, sektor peternakan, sektor perkebunan tahunan, sektor hortikultura dan sektor perkebunan semusim. Pada sektor agrokomples laju pertumbuhan tidak konsisten pada setiap tahunnya. Sedangkan laju pertumbuhan sektor perikanan bernilai lebih tinggi persentasenya daripada persentase laju pertumbuhan sektor agrokomples terutama pada tahun 2022 dan tahun 2023. Hal ini dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto pada sektor perikanan, cukup memberikan kontribusi untuk kenaikan laju pertumbuhan setiap tahunnya Kontribusi PDRB sektor perikanan terhadap PDRB sektor agrokomples rata rata diatas 6 % setiap tahunnya.

Produksi Perikanan tahun 2023:

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Produksi Tangkap (Ton)	254	253	230	267	280	272.	270,742	249,300
Produksi Budidaya (Ton)	5.001	6.303	6.083	6.886	6.376	6.981	6.273	6.123
Produksi Olahan (Ton)	1.511	1.743	1.897	2.035	2.112	2.202	2.269	2.337
Produksi Ikan Hias (ekor)	2.303.000	2.927.000	3.208.000	11.974.000	15.782.500	16.299.525	15.198.523	15.785.420
Produksi benih ikan (ekor)	116.379.000	174.293.000	228.352.000	252.271.000	277.887.000	280.015.000	366.710.000	277.510.000

Dari tabel capaian produksi perikanan tangkap terdapat penurunan produksi sebesar 21,4 ton akibat cuaca yang sedang tidak menentu dan puncak produksi air sungai menjadi turun karena kemarau panjang. Akibatnya nelayan tangkap yang melakukan penangkapan disungai berkurang. Untuk ekosistem perikanan sungai di Purbalingga relatif aman. Hal ini karena kesadaran masyarakat menegenai pentingnya menjaga sungai sudah baik.

Untuk angka produksi budidaya juga mengalami penurunan dari tahun 2022 dari 6.273. ton menjadi 6.123 untuk tahun 2023 turun 150 ton hal ini lebih dikarenakan menurunnya jumlah pembudidaya ikan karena faktor kemarau panjang cukup panjang hampir 8 bulan dan curah hujan kurang serta naiknya harga pakan yang mengakibatkan pembudidaya mengurangi jumlah kolam dan jumlah pembesaran yang dipelihara, efek tersebut mengakibatkan angka produksi konsumsi berkurang. Efek revitalisasi saluran air dari BBWS Serayu juga mempengaruhi produksi benih dan budidaya. Untuk wilayah produksi yang mengandalkan saluran air sebagai pengairan kolam sangat berpengaruh, karena lebih dari 3 bulan revitalisasi sehingga produktifitas juga menurun.

Dari ikan hias juga mengalami kenaikan produksi karena menurunnya animo masyarakat memelihara ikan hias semakin tinggi dari data di atas ada kenaikan 50 ribuan ekor ikan hias.

Produksi olahan ikan pada tahun 2022 yang mencapai 2.269 ton mengalami kenaikan menjadi 2.237 ton pada tahun 2022 untuk data produksi bulanan bisa terlihat pada tabel sebagai berikut:

VOLUME PRODUKSI OLAHAN IKAN PER BULAN TAHUN 2023

JENIS PENGOLAHAN	VOLUME PRODUKSI OLAHAN SEMESTER I (KG)						
	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI
Pemindangan	188.642	188.489	185.829	183.503	179.847	188.763	186.774
Pelumatan Daging Ikan	8.519	7.716	6.853	7.818	6.909	8.675	7.471
Pengolahan Lainnya	377	409	312	251	231	364	195
Jumlah	197.538	196.613	192.995	191.572	186.986	197.801	194.440

JENIS PENGOLAHAN	VOLUME PRODUKSI OLAHAN SEMESTER I (KG)						JUMLAH TOTAL
	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER	
Pemindangan	186.774	187.385	187.690	187.690	188.110	188.148	2.240.870
Pelumatan Daging Ikan	7.471	7.917	7.678	7.678	7.567	8.140	92.941
Pengolahan Lainnya	195	232	233	233	216	219	3.272
Jumlah	194.440	195.534	195.602	195.602	195.893	196.507	2.337.083

**PRODUKSI DAN NILAI PRODUKSI OLAHAN HASIL PERIKANAN
PADA SEMESTER I DAN SEMESTER II TAHUN 2023**

JENIS PENGOLAHAN	SEMESTER I			SEMESTER II			JUMLAH
	PROD	HARGA	NILAI	PROD	HARGA	NILAI	
Pemindangan	1.115.073	55.000	61.329.003.728	1.125.797	50.000	56.289.868.740	117.618.872.468
Pelumatan Daging Ikan	46.489	60.000	2.789.346.924	46.452	50.000	2.322.575.325	5.111.922.249
Pengolahan Lainnya	1.944	100.000	194.351.576	1.329	100.000	132.877.725	327.229.301
Jumlah	1.163.505		64.312.702.228	1.173.578		58.745.321.790	123.058.024.018

Berdasarkan data statistik pengolahan tahun 2023, Produksi olahan ikan di dominasi oleh kegiatan pengolahan ikan dalam bentuk pindang yang mencapai 2.240 ton, kemudian disusul oleh pelumatan daging ikan seperti bakso, nuget, kaki naga dan lainnya yang mencapai 92,9 ton dan pengolahan ikan lainnya yang mencapai 3,2 ton. Sementara itu, volume produksi tertinggi dicapai pada bulan januari yang mencapai 188 ton. Bahan baku ikan kembung, tuna untuk kegiatan pengolahan terutama produk pindang berasal dari Cilacap, Pemalang, Tegal dan Brebes sementara untuk bahan baku ikan lele untuk kegiatan pelumatan daging berasal dari wilayah Purbalingga. Jumlah pengolah hasil perikanan pada tahun 2023 sebanyak 97 unit pengolahan ikan, dengan rincian yaitu unit pengolahan pemindangan sebanyak 80, unit pengolahan ikan untuk pelumatan daging sebanyak 13 dan unit pengolahan ikan lainnya sebanyak 4 unit.

Bantuan untuk kelompok pembudidaya berupa belanja Hibah uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan perundang-undangan Yang terdiri dari 35 Pokdakan dan kelompok Usaha Bersama di Kabupaten Purbalingga yaitu

NO	NAMA POKDAKAN	KETUA	ALAMAT		NILAI
			DESA	KECAMATAN	
1	Mina Ikari	Sutikno Aji	Mrebet	Mrebet	10.000.000
2	Mina Sejati	Muhroji	Karangturi	Mrebet	10.000.000
3	Mina Paku Jaya	Sutanto	Mangunegara	Mrebet	10.000.000
4	Tri Daya Makmur	Sunarmo	TPI Kembaran Kulon	Purbalingga	10.000.000
5	Ulet Jaya Mandiri	Suratno	Kalitinggar	Padamara	10.000.000
6	Mina Lestari	R.Awan Setyono	Wanogara Wetan	Rembang	10.000.000
7	Sumber Mina	Mugiarto Darto	Sumingkir	Kutasari	10.000.000
8	Cikal Mandiri	Sarwono	Grecol	Kalimanah	10.000.000
9	Mina Lestari	Sutarno,A.S	Karanggambas	Padamara	10.000.000
10	Tirta Sari	Pramudya Okta P.	Prigi	Padamara	10.000.000
11	Serumpun	Suwanto	Selabaya	Kalimanah	10.000.000
12	Mina Makmur	Daryanto	Blater	Kalimanah	10.000.000

13	Mina Putra Cendana	Mukhitun	Kajongan	Bojongsari	10.000.000
14	Mina Fair	Muji Handono	Karangbanjar	Bojongsari	10.000.000
15	Mina Harapan Jaya	Alip Widodo	Babakan	Kalimanah	12.500.000
16	Mina Dadi	Suparso	Jompo	Kalimanah	10.000.000
17	Usaha Mina	Guntoro	Beji	Bojongsari	12.500.000
18	Mina Harapan	Wahyono	Serayu Karanganyar	Mrebet	10.000.000
19	Berkah Mina Kolongsari	Saryo Setiono	Banjaran	Bojongsari	10.000.000
20	Ulam Mulyo	Tholabun Kanang M	Losari	Rembang	10.000.000
21	Mina Nyawiji	Sugeng Riyadi	Mergasana	Kertanegara	10.000.000
22	Mina Berkah Sejahtera	Dedi Wiandi	Panunggalan	Pengadegan	10.000.000
23	Mandiri Tirta Jaya Usaha	Khadimin	Langgar	Kejobong	10.000.000
24	Ulam Sari	Warto Andrianto	Pangempon	Kejobong	10.000.000
25	Ulam Giras	Eko Wahyono	Mangunegara	Mrebet	10.000.000
26	Ulam Sari	Prayitno	Slinga	Kaligondang	50.000.000
27	Maju Jaya	Sutrisno	Cipawon	Bukateja	20.000.000
28	Mina Wungu	Muhamad Syarif H.	Kutawis	Bukateja	20.000.000
29	Kembar Mina	Afandi	Cipawon	Bukateja	25.000.000
30	Kube Cana	Suratim	Wirasaba	Bukateja	10.000.000
31	Karya Ulam	Noto Miharjo Narji	Bodaskarangjati	Rembang	15.000.000
32	Bargo	Tejo Widadi Rochedi	Bodaskarangjati	Rembang	15.000.000
33	Mandiri Sejahtera	Purwanto	Metenggeng	Bojongsari	20.000.000

Sasaran kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota adalah untuk meningkatkan persepsi dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya konsumsi ikan bagi peningkatan gizi masyarakat. Mendorong peningkatan minat konsumsi ikan sebagai salah satu cara mengatasi problem gizi di masyarakat.

Segegap elemen masyarakat diharapkan berperan serta dalam mendorong kesadaran gizi individu maupun kolektif masyarakat agar gemar mengkonsumsi ikan. Pemenuhan kandungan gizi dan protein bermanfaat langsung bagi tumbuh kembang seorang anak. Untuk itu Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang bentuk kegiatannya adalah Promosi dan Gemarikan diharapkan berdampak terhadap peningkatan konsumsi ikan. Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) kepada masyarakat sehingga akan tumbuh kesadaran bahwa menyediakan ikan bagi keluarga

- Dalam upaya mendukung pencapaian Peningkatan konsumsi ikan di Kabupaten Purbalingga, maka pada tahun 2023 melaksanakan kegiatan Roadshow Gemarikan. Tujuan dari Roadshow Gemarikan adalah memberikan pemahaman pentingnya manfaat ikan bagi generasi muda dimana sasarannya adalah meningkatkan persepsi dan pemahaman tentang pentingnya konsumsi ikan bagi peningkatan gizi masyarakat.

- Penerima manfaat kegiatan Roadshow adalah generasi muda dalam usia sekolah mulai dari PAUD sampai SMU, Organisasi kemasyarakatan; kelompok masyarakat lain yang menjadi target Peningkatan konsumsi ikan.
- Kegiatan Roadshow Gemarikan telah dilaksanakan di SD Negeri 1 Karanganyar Kecamatan Karanganyar, dimana dalam kegiatan ini, juga digunakan sarana pendukung berupa Mobil ATI sebagai media komunikasi, penyebarluasan informasi serta edukasi tentang pentingnya manfaat ikan. Media promosi yang digunakan dalam rangka mendukung promosi Peningkatan konsumsi ikan antara lain leaflet, poster, brosur, tayangan VCD/ DVD dan lain-lain.
- materi dalam Roadshow Gemarikan untuk peserta PAUD-SMP adalah:
 - ✓ Definisi dan jenis ikan
 - ✓ Kandungan gizi ikan dan manfaatnya bagi kesehatan dan kecerdasan
 - ✓ Cara membedakan ikan segar dan tidak segar
 - ✓ Dongeng tentang manfaat ikan
 - ✓ Pemutaran lagu-lagu Gemarikan
 - ✓ Topik lain yang berkaitan dengan pengembangan *image* ikan sebagai bahan bergizi yang menyehatkan dan mencerdaskan
- ✓ Untuk Kampanye Gemarikan berupa pemberian paket bantuan ikan dan olahan ikan kepada ibu hamil, ibu menyusui serta ibu balita sebanyak 90 paket Kegiatan Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) dilakukan melalui pemberian paket bantuan ikan dan olahan ikan kepada ibu hamil, ibu menyusui serta ibu balita yang dibagikan pada desa Gembong, Kecamatan Bojongsari pada tanggal 21 September 2023 yang angka *prevalensi stunting* cukup tinggi di Kabupaten Purbalingga. Jenis paket bantuan olahan ikan yang diberikan yaitu abon ikan, pastel ikan, bakso ikan, macaroni patin dan otak-otak ikan.

Dari angka nilai produksi perikanan di tahun 2022 sebesar Rp 299.783.411.000 naik menjadi 306.642.970.000 dari pembahasan diatas bisa disimpulkan terdapat kenaikan angka rupiah secara total yang menggambarkan sektor perikanan turut menyumbang andil dalam peningkatan kesejahteraan Masyarakat. Kinerja capaian juga diatas 101 persen jika dibandingkan target 2023 sebesar Rp 305.796.535.000.

Realisasi Program dan Kegiatan APBD Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Dengan alokasi anggaran Rp. 4.565.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.474.620,- (97,67%) digunakan untuk kegiatan penyusunan dokumen Renja dan laporan Laporan lainnya sejumlah 5 buku. Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen Renstra dan renja perangkat daerah.

Permasalahan;

- Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan

- Tidak ada hal yang perlu dilaporkan.

1.1.2. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dengan alokasi anggaran Rp. 4.150.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.139.000,- (99,73 %) digunakan penyusunan dokumen laporan bulanan, evaluasi kinerja per tribulanan, penyusunan LKPJ dan LKJIP. Hasil kegiatan terdokumentasinya laporan bulan dan tersusunnya laporan kinerja OPD

Permasalahan;

- Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan

- Tidak ada hal yang perlu dilaporkan

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Dengan alokasi anggaran Rp. 3.897.809.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.797.256.533,- (97,42 %).

Permasalahan;

1.2.1.1. Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan

1.2.1.2. Sisa anggaran merupakan belanja gaji yang tidak direalisasikan karena pegawai dan pejabat yang pensiun,

1.2.2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Dengan alokasi anggaran Rp. 99.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 94.795.694,- (95,75 %) digunakan membiayai perjalanan dalam dan luar daerah, rapat-rapat, koordinasi, konsultasi dalam daerah

Permasalahan;

1.2.2.1. Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan

1.2.2.2. Tidak ada hal yang perlu dilaporkan

1.2.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Dengan alokasi anggaran Rp. 40.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 39.977.400 (99,99 %)

Permasalahan;

1.2.3.1. Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan

1.2.3.2. Tidak ada hal yang perlu dilaporkan

1.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Pada Perangkat Daerah

1.3.1. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Dearah pada SKPD

Dengan alokasi anggaran Rp. 4.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.982.500,- (99 %) tidak digunakan

Permasalahan

1.3.1.1. Honoprarium pelkasnaan kegiatan belum maksimal 12 bulan.

Hal-hal yang perlu dilaporkan

1.3.1.2. Tidak ada hal yang perlu dilaporkan.

1.4. Kegiatan Pengadadn Barang Milik Daerah dan Perangkat Daerah

1.4.1. Sub Kegiatan Pengaddan Peralatan dan Mesin lainnya

Dengan alokasi anggaran Rp. 22.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 21.990.000- (99,51 %)

Permasalahan

1.4.1.1. Tidak ada .

Hal-hal yang perlu dilaporkan

Tidak ada hal yang perlu dilaporkan

1.5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah

1.5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Dengan alokasi anggaran Rp. 5.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.976.500,- (99 %) digunakan untuk pemeliharaan listrik kantor selama 12 bulan. Hasil sub kegiatan yaitu terfasilitasinya pemeliharaan listrik kantor selama 12 bulan.

Permasalahan;

1.5.1.1. Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan

1.5.1.2. Tidak ada yang perlu dilaporkan.

1.5.2. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Dengan alokasi anggaran Rp. 61.664.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 60.872.286,- (98,72 %) digunakan untuk pembelian BBM kendaraan operasional dinas sejumlah 12.000 liter, isi tabung gas 16 tabung, bahan kebersihan kantor untuk 12 bulan. Hasil sub kegiatan yaitu tercukupinya kebutuhan bahan pembersih, tabung gas, BBM kendaraan dinas selama 12 bulan.

Permasalahan;

1.5.2.1. Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan

1.5.2.2. Tidak ada yang perlu dilaporkan.

1.5.3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
Dengan alokasi anggaran Rp. 2.800.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.790.000,- (99.64 %) digunakan biaya langganan koran lokal dan surat kabar regional selama 12 bulan. Hasil sub kegiatan terpenuhinya langganan koran selama 12 bulan.

Permasalahan;

1.5.3.1. Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan

1.5.3.2. Tidak ada yang perlu dilaporkan.

1.5.4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Dengan alokasi anggaran Rp. 20.500.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.425.000,- (99,63 %) digunakan untuk belanja makanan dan minum rapat sejumlah 500 dus dan jamuan makan minum tamu sejumlah 60 dus. Hasil sub kegiatan yaitu tercukupinya makan minum rapat dan jamuan makan minum tamu selama 12 bulan.

Permasalahan;

1.5.4.1. Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan

1.5.4.2. Tidak ada hal yang perlu dilaporkan.

1.5.5. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD

Dengan alokasi anggaran Rp. 3.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- (100 %)

1.6. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Dengan alokasi anggaran Rp. 500.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 500.000,- (100,00 %) digunakan untuk pengadaan perangko 100 lembar dan jasa pengiriman paket sejumlah 12 kali. Hasil sub kegiatan yaitu tersedianya perangko dan jasa pengiriman surat/dokumen.

Permasalahan;

1.6.1.1. Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan

1.6.1.2. Tidak ada hal yang perlu dilaporkan.

1.6.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Dengan alokasi anggaran Rp. 163.220.000 - dan realisasi anggaran sebesar Rp. 148.088.337,- (90,73 %) digunakan untuk biaya langganan air, tagihan listrik dan

biaya langganan internet dinas selama 12 bulan. Hasil sub kegiatan yaitu terfasilitasinya langganan air, listrik dan internet selama 12 bulan.

Permasalahan;

1.6.2.1. Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan

1.6.2.2. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 31.505.007 karena efisiensi pembayaran langganan listrik dan air.

1.6.3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dengan alokasi anggaran Rp. 13.545.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 13.296.600,- (98,17 %) Hasil sub kegiatan yaitu terlaksananya jasa peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan.

Permasalahan;

1.6.3.1. Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan

1.6.3.2. Tidak ada hal yang perlu dilaporkan.

1.6.4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Dengan alokasi anggaran Rp. 283.425.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 283.038.607- (99,86 %) digunakan untuk honorarium tenaga kebersihan 3 orang selama 12 bulan dan dan pemeliharaan gedung. Silpa anggaran karena ada THL yang mengundurkan diri. Hasil sub kegiatan yaitu tercukupinya honor tenaga kebersihan dan pemeliharaan gedung dinas.

Permasalahan;

1.6.4.1. Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan

1.6.4.2. Tidak ada hal yang perlu dilaporkan.

1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

1.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Dengan alokasi anggaran Rp. 140.454.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 140.244.900,- (99,85 %) pergantian suku cadang dan pelumas, kendaraan operasional dinas sejumlah 5 kendaraan roda empat dan roda dua 40 unit, biaya pajak kendaraan roda 4 sejumlah 5 unit, roda dua 40 unit. Hasil sub kegiatan yaitu terpenuhinya pemeliharaan kendaraan operasional DKPP.

Permasalahan;

1.7.1.1. Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan

1.7.1.2. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 34.849.130 disebabkan sisa waktu yang tidak memungkinkan dalam pengurusan penerbitan duplikat BPKB.

1.7.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Dengan alokasi anggaran Rp. 5.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.983.200,- (99,66 %) digunakan untuk pemeliharaan peralatan kantor (komputer, notebook, Hasil sub kegiatan yaitu terpeliharanya perlatan kantor selama 12 bulan.

Permasalahan;

1.7.2.1. Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan

1.7.2.2. Tidak ada hal yang perlu dilaporkan.

1.7.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Dengan alokasi anggaran Rp. 7.900.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.895.000,- (99,94 %) digunakan terpeliharanya gedung kantor DKPP.

Permasalahan;

1.7.3.1. Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan

1.7.3.2. Tidak ada hal yang perlu dilaporkan.

2. Program Pengolahan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

2.1 Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

1.1.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan infrastruktur Logistik

Dengan alokasi anggaran Rp. 2.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.000.000,- (100 %)

3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

3.1 Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

3.1.1. Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan Dengan alokasi anggaran Rp. 4.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.987.000,- (99,68 %)

Permasalahan;

3.1.1.1. Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan

3.1.1.2. Tidak ada hal yang perlu dilaporkan.

3.1.2. Sub Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan

Dengan alokasi anggaran Rp. 4.000.000 ,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 3.978.500 (99,46%)

Permasalahan;

3.1.2.1. Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan

3.1.2.2. Silpa merupakan perjalanan dinas yang tidak di SPJkan

3.1.3. Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan

Dengan alokasi anggaran Rp. 5.000.000 ,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.940.500 ,- (99,28 %)

3.2 Kegiatan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per kapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

3.2.1 Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun

Dengan alokasi anggaran Rp. 3.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 2.989.500,- (99,65 %)

3.2.2 Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

Dengan alokasi anggaran Rp. 35.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 34.963.200 ,- (99,89 %)

3.2.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun

Dengan alokasi anggaran Rp. 24.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 3.996.500,- (16,05 %) silpa merupakan anggaran Kegiatan penyusunan skor

PPH tetapi tidak dilaksanakan.

4. Program Penanganan Kerawanan Pangan

4.1. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

4.1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Dengan alokasi anggaran Rp. 386.000.000 ,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 385.835.100,- (99,96 %)

Permasalahan;

4.1.1.1. Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan

4.1.1.2. adanya silpa dikarenakan ada anggaran rasle yang tidak tersalurkan

5. Program Pengawasan Keamanan Pangan

5.1 Kegiatan Pelaksanann Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

5.1.1 Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

Dengan alokasi anggaran Rp. 12.500.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.994.600,- (95,96 %)

5.1.2 Sub Kegiatan Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

Dengan alokasi anggaran Rp. 5.500.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.269.600,- (77,53%)

Permasalahan;

5.1.2.1. Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan

5.1.2.2. Tidak ada hal yang perlu dilaporkan

5.1.3 Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

Dengan alokasi anggaran Rp. 1.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 978.200,- (97,82 %)

6. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

6.1. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota

6.1.1. Sub Kegiatan Penyediaan data dan Informasi Sumber Daya Ikan

Dengan alokasi anggaran Rp. 4.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.971.100,- (99,28 %)

Permasalahan;

6.1.1.1. Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan

6.1.1.2. Tidak ada yang perlu dilaporkan

6.2. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota

6.2.1. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

Dengan alokasi anggaran Rp 25.000.000 ,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 22.095.400 ,- (88,38 %)

Permasalahan;

6.2.1.1. Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan

6.2.1.2. Tidak ada yang perlu dilaporkan

7. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

1.1 Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil

1.1.1 Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Dengan alokasi anggaran Rp 93.825.000 ,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 92.446.400,- (98.53%)

Permasalahan;

1.1.1.1 Kegiatan prosedur Perijinin dari Kementerian sudah tidak ada sehingga alokasi dikegiatan ini tidak dilaksanakan

Hal-hal yang perlu dilaporkan

1.1.1.2 Anggaran silpa

7.2. Kegiatan Pengolahan Pembudidayaan Ikan

7.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Data Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Dengan alokasi anggaran Rp 7.500.000 ,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 6.195.000 ,- (82,60 %)

Permasalahan;

7.2.1.1. Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan

7.2.1.2. Tidak ada yang perlu dilaporkan

7.2.2 Sub Kegiatan Penyediaan Prasana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Dengan alokasi anggaran Rp 628.850.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 628.573.750,- (99, 96 %)

Permasalahan;

7.2.2.1 Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan

7.2.2.2 Tidak ada yang perlu dilaporkan

8. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

8.1. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil

8.1.1. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota

Dengan alokasi anggaran Rp 3.430.000 ,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 3.62.800 ,- (89,29 %)

Permasalahan;

8.1.1.1. Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan

8.1.1.2. Tidak ada yang perlu dilaporkan

8.2. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

8.2.1. Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Dengan alokasi anggaran Rp 55.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 54.581.900 ,- (99%)

Permasalahan;

8.2.1.1. Tidak ada permasalahan

Hal-hal yang perlu dilaporkan

8.2.1.2. Tidak ada yang perlu dilaporkan

BAB III
TUJUAN,SASARAN,PROGRAM,DAN
KEGIATAN

A. TUJUAN DAN SASARAN

VISI

Visi pembangunan Kabupaten Purbalingga tahun 2021 - 2026 merupakan implementasi dari visi Visi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga periode Tahun 2021-2026 yaitu:

"PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA
SAING, MENUJUMASYARAKAT SEJAHTERA
YANG BERAKHLAK MULIA"

MISI

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT / Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak;
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul - simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKMd dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk

pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;

6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa;

7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah / Infrastruktur dengan tetap memperhatikan Kelestarian Lingkungan.

Adapun Tujuan dan Sasaran DKPP pada tahun 2024 terangkum dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagai berikut dalam rangka mencapai tugas DKPP mengampu Visi ketiga Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak; dan kelima Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul - simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja yang tertuanga dalam IKU DKPP sebagai Berikut:

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 – 2026**

NAMA PERANGKAT DAERAH	: DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
URUSAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN	: 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
TUGAS	: Membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Pangan dan Bidang Perikanan yang menjadi kewenangan daerah .
FUNGSI	: 1. Perumusan Kebijakan bidang ketahanan pangan dan perikanan meliputi Ketersediaan dan Distribusi, Konsumsi dan Keamanan Pangan serta Perikanan.

2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan meliputi Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan serta Perikanan.
3. Pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan meliputi Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan serta Perikanan
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan dan perikanan meliputi ketersediaan dan distribusi pangan, Konsumsi dan Ketersediaan pangan serta Perikanan.
5. Pelaksanaan Fungsi Kesekretariatan Dinas
6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD
7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR OR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
Tujuan 1 :		
Meningkatkan ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Sebagai tolak ukur ketahanan pangan masyarakat di Kabupaten Purbalingga apakah sudah memenuhi standar indeks kebutuhan pangan secara nasional • Formulasi Pengukuran: <i>angka indeks IKP</i> Target: 83,3
Sasaran 1.1 :		
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas konsumsi pangan	Skor PPh Konsumsi	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Sebagai tolak ukur skor Pola Pangan harapan masyarakat Purbalingga apakah sudah memenuhi standar pola pangan harapan secara nasional • Formulasi Pengukuran: <i>Skor PPH = skor PPh kelompok padi padian + umbi umbian + skor pph kelompok lain.</i> Target: 88,5
Tujuan 2 :		
Meningkatkan kualitas kelembagaan DKPP	Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Target Nilai: 40
Sasaran 1.2 :		

MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR OR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
Meningkatkan kualitas kelembagaan DKPP	Nilai SAKIP DKPP	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat implementasi SAKIP Kabupaten Purbalingga • Formulasi Pengukuran: $\text{Nilai Evaluasi AKIP} = \frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Bobot}} \times 100\%$ Target : 69,38
Tujuan 3 :		
Meningkatnya nilai tambah sektor perikanan	PDRB sektor perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Sebagai tolak ukur produk domestic bruto sector perikanan dikabupaten Purbalingga dalam satu tahun • Formulasi Pengukuran: $\text{angka PDRB sub sektor Perikanan}$ Target: 455.000.000.000
Sasaran 1.3 :		
Meningkatnya nilai produksi ikan	Nilai produksi perikanan tangkap, hias, budidaya dan pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Sebagai tolak ukur produksi perikanan budidaya, hias, tangkap, pengolahan dalam satu tahun di Kabupaten Purbalingga • Formulasi Pengukuran: $\text{Nilai Produksi: Total Produksi Perikanan Tangkap, Budidaya}$ Target: Rp 318.124.512.600

B. PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada Tahun 2025 DKPP Kabupaten Purbalingga telah merencanakan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kab. Purbalingga

Tahun 2025

Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.02.0000

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN

PERIKANAN

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.02.0000

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN

PERIKANAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN								6.466.425.00 0,00					6.831.065.00 0,00
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								5.676.216.00 0,00					5.906.065.00 0,00
2	0 9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								5.676.216.00 0,00					5.906.065.00 0,00
2	0 9 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								5.147.416.00 0,00					5.356.065.00 0,00
2	0 9 1 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								4.500.000,00					10.000.000,0 0
2	0 9 1 1 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
		-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Kab. Purbaling ga, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	2.500.000,00	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.000.000,00	
2	0 9 1 1 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
		-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Kab. Purbaling ga, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	2.000.000,00	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.000.000,00	

					-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	4 Orang	-	4.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	5.000.000,00		
2	0	0	2.0			Administrasi Umum Perangkat Daerah						46.800.000,00						62.400.000,00	
2	0	0	2.0	000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
					-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	4.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.000.000,00		
2	0	0	2.0	000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
					-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	4.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00		
2	0	0	2.0	000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
					-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.000.000,00		
2	0	0	2.0	000		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													

					-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	1.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.000.000,00
2	09	01	2.06	0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu											
					-	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	3.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	6.000.000,00
2	09	01	2.06	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
					-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	6.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	8.000.000,00
2	09	01	2.06	0011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
					-	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	2.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	2.400.000,00
2	09	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						467.370.000,00					469.665.000,00
2	09	01	2.08	0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
					-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kab. Purbalingga, Semua	-	1 Laporan	-	400.000,00	Dana Transfer Umum-		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00

2	0	0	2.0		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						1.600.000,00					1.600.000,00
2	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik											
					-	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	-	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	1.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	1 Laporan	1.600.000,00
2	0	0			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						44.000.000,0					55.400.000,0
2	0	0	2.0		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						10.400.000,0					10.400.000,0
2	0	0	2.0	001	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota											
					-	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	-	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	5 Unit	-	4.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	5 Unit	4.000.000,00
2	0	0	2.0	001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis											
					-	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	-	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	3.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	1 Laporan	3.200.000,00
2	0	0	2.0	001	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)											
					-	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	-	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	3.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	3.200.000,00

2	0	0	2.0		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi						33.600.000,00					45.000.000,00
2	0	0	2.0	000	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun											
					-	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	-	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	2.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	5.000.000,00
2	0	0	2.0	000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal											
					-	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	-	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	28.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	35.000.000,00
2	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun											
					-	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	-	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	3.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan	5.000.000,00
2	0	0			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						468.000.000,00					468.000.000,00
2	0	0	2.0		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota						468.000.000,00					468.000.000,00
2	0	0	2.0	000	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											

					-	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	-	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	15.000.000,00	
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						786.209.000,00					920.000.000,00
3	2					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						786.209.000,00					920.000.000,00
3	2	0				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						28.200.000,00					45.000.000,00
3	2	0	2.0			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Dusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						3.200.000,00					5.000.000,00
3	2	0	2.0	000		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan											
						-	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	-	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	3.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	5.000.000,00
3	2	0	2.0			Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota						25.000.000,00					40.000.000,00
3	2	0	2.0	000		Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil											
						-	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	-	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	10 Kelompok	-	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	10 Kelompok	40.000.000,00

3	2	0			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA							711.265.000,00					810.000.000,00
3	2	0	2.0		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil							93.825.000,00					100.000.000,00
3	2	0	2.0	000	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan												
					-	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	30 Kelompok	-	93.825.000,00	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	30 Kelompok	100.000.000,00	
3	2	0	2.0		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan							617.440.000,00					710.000.000,00
3	2	0	2.0	000	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota												
					-	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	6.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000.000,00	
3	2	0	2.0	000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota												
					-	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	20 Unit	-	611.440.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20 Unit	700.000.000,00	
3	2	0			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN							46.744.000,00					65.000.000,00
3	2	0	2.0		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil							2.744.000,00					5.000.000,00

3	2	0	2.0	000	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko													
	5	6	1	5		-	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	-	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	2.744.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Dokumen	5.000.000,00	
3	2	0	2.0		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						44.000.000,0					60.000.000,0		
	5	6	3										0				0	
3	2	0	2.0	000	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
	5	6	3	2		-	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	-	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	10 Pelaku Usaha	-	44.000.000,0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	10 Pelaku Usaha	60.000.000,0	
													0				0	
X					NON URUSAN						4.000.000,00						5.000.000,00	
X	X				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						4.000.000,00							5.000.000,00
	X				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.000.000,00							5.000.000,00
	X	0			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.000.000,00							5.000.000,00
	X	1	2.0															
	X	1	9															
X	X	0	2.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
	X	1	9	6		-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	20 Unit	-	4.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	5.000.000,00	
TOTAL												6.466.425.00						6.831.065.00
												0,00						0,00

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja DKPP Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun kedua Rencana Strategis DKPP Tahun 2021-2026

Target Kinerja perencanaan pembangunan Daerah yang diantumkan dalam RPJM berkaitan dengan tingkat kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Meningkatkan Ketahanan pangan saerah yang mantap dengan mengembangkan sub sistem ketersediaan an istribusi pangan,kewaspadaab dan keamanan pangan serta pengembangan tekhnologi pangan dengan meningkatkan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat yang bermutu,bergizi,dalam jumlah yang cukup dan beragam serta menistribusikan dan diakses.
2. Meningkatkan kemandirian pangan masyarakat melalui kelembagan pangan yang mendukung ketersediaan,distribusi,konsumsi,eri dan keanekaragaman pangan serta keamanan pangan dan kewaspadaan pangan untuk mendorong berfungsinya kelembagaanpangan masyarakat,dengan meningkatkan kualitas SDM melalui pembinaan,pelatihan atau bimbingan tehnis pengelolaan kelembagaan pangan masyarakat.
3. Meningkatkan sinergitas antar lembaga pemerintah dan masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan wilayah dengan meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah dan masyarakat yang terintegrasi dalam Dewan Ketahanan Pangan.
4. Meningkatkan kemandirian dan daya saing sub sektor Perikanan dengan meningkatkan Produksi dan Nilai Tambah hasil Perikanan melalui penerapan tehnologi budidaya, pakan dan genetik ikan.